

Analisis Pengelolaan Keuangan pada Pelaku UMKM di Pasar Beringharjo Yogyakarta untuk Meningkatkan Kinerja Usaha dan Keberlanjutan Bisnis

Muhammad Ramadhan Mokodompit^{1*}, Nugraeni²

¹⁻² Universitas Mercubuana Yogyakarta, Indonesia

Alamat: Jl. Ring Road Utara, Ngropoh, Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Korespondensi penulis: ramaternate212@gmail.com*

Abstract. This study aims to provide an in-depth analysis of financial management practices among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) operating in Beringharjo Market, Yogyakarta, focusing on four key indicators: financial planning, recording, reporting, and internal control. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through semi-structured interviews, participatory observation, and documentation from selected MSME owners. The findings reveal that all respondents acknowledge the importance of bookkeeping in business sustainability; however, a significant proportion have not adopted systematic methods for recording debts, receivables, and inventory. Although all respondents prepare profit and loss statements, only around half utilize these reports as a reference for strategic decision-making. Internal control is identified as the most underdeveloped aspect, marked by the absence of cash reconciliation procedures, inventory verification, and basic internal audits. This lack of structured control mechanisms heightens the risk of financial discrepancies and operational inefficiencies. Moreover, limited financial literacy and the absence of formal accounting training further contribute to inconsistent application of sound financial practices. Based on these observations, the study recommends the implementation of targeted capacity-building programs that include practical, hands-on training in accordance with the Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM). These initiatives should be accompanied by continuous mentoring from local government agencies and market management to ensure long-term sustainability. Strengthening financial literacy, enhancing systematic management processes, and embedding effective internal controls are critical steps to improving accountability, informed decision-making, and overall business resilience for MSMEs in traditional markets. This research offers valuable insights into the unique financial management challenges faced by small-scale traders and provides practical solutions for improving their economic performance and competitiveness.

Keywords: Bookkeeping, Financial Management, MSMEs, SAK EMKM, Traditional Market

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam mengenai praktik pengelolaan keuangan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, dengan fokus pada empat indikator utama: perencanaan keuangan, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian internal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi dari pemilik UMKM yang dipilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden menyadari pentingnya pembukuan bagi keberlangsungan usaha, namun sebagian besar belum menerapkan metode yang sistematis dalam pencatatan utang, piutang, dan persediaan. Meskipun seluruh responden membuat laporan laba rugi, hanya sekitar setengahnya yang memanfaatkan laporan tersebut sebagai acuan dalam pengambilan keputusan strategis. Pengendalian internal diidentifikasi sebagai aspek yang paling lemah, ditandai dengan tidak adanya prosedur rekonsiliasi kas, verifikasi persediaan, serta audit internal dasar. Ketidadaan mekanisme pengendalian yang terstruktur meningkatkan risiko terjadinya ketidaksesuaian keuangan dan inefisiensi operasional. Selain itu, keterbatasan literasi keuangan dan tidak adanya pelatihan akuntansi formal turut berkontribusi terhadap penerapan praktik keuangan yang kurang konsisten. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penerapan program peningkatan kapasitas yang mencakup pelatihan praktis berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), disertai pendampingan berkelanjutan dari pemerintah daerah dan pengelola pasar untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Penguatan literasi keuangan, penerapan manajemen yang sistematis, serta pengendalian internal yang efektif menjadi langkah penting untuk meningkatkan akuntabilitas, pengambilan keputusan yang tepat, dan ketahanan usaha UMKM di

pasar tradisional. Penelitian ini memberikan wawasan berharga mengenai tantangan unik pengelolaan keuangan pedagang skala kecil dan menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan kinerja ekonomi dan daya saing mereka.

Kata kunci: UMKM, Pengelolaan Keuangan, Pencatatan, SAK EMKM, Pasar Tradisional

1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran strategis dalam menopang perekonomian nasional, baik dalam hal penciptaan lapangan kerja maupun pemerataan distribusi pendapatan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (2021), terdapat lebih dari 64 juta pelaku UMKM di Indonesia yang memberikan kontribusi sebesar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Kontribusi tersebut menempatkan UMKM sebagai pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Muhamad, 2023).

Namun demikian, di tengah kontribusi yang signifikan tersebut, UMKM masih menghadapi tantangan struktural yang cukup kompleks, salah satunya terkait dengan lemahnya kapasitas dalam pengelolaan keuangan. Banyak pelaku UMKM belum memiliki pemahaman dan keterampilan yang memadai mengenai pentingnya pencatatan keuangan yang sistematis, akurat, dan berkelanjutan. Ketidakmampuan dalam mengelola aspek keuangan secara profesional berdampak pada ketidakmampuan dalam memantau arus kas, mengevaluasi kinerja usaha, serta merancang strategi pengembangan jangka panjang (Nugraha et al., 2025). Tanpa pengelolaan keuangan yang memadai, UMKM menjadi rentan terhadap kesalahan pengambilan keputusan bisnis, kebocoran kas, hingga potensi kebangkrutan.

Kondisi tersebut juga tercermin pada pelaku UMKM di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, salah satu pusat perdagangan tradisional yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi. Sebagian besar pelaku usaha di pasar ini merupakan bisnis keluarga atau usaha perorangan yang bersifat turun-temurun. Meskipun telah terjadi adaptasi terhadap era digital melalui penggunaan media sosial untuk promosi, praktik pengelolaan keuangan masih dilakukan secara konvensional. Hasil observasi awal dan wawancara informal menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang tertib, masih mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, serta tidak menyusun laporan laba rugi secara berkala. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan literasi keuangan yang memerlukan perhatian dan intervensi serius, terutama dari lembaga pendamping dan pemerintah daerah (Arianto et al., 2024).

Dalam konteks manajemen keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terdapat empat indikator utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu: perencanaan keuangan, pencatatan keuangan, pelaporan keuangan, dan pengendalian keuangan.

- a. Perencanaan keuangan merujuk pada proses penyusunan anggaran serta perencanaan penggunaan dana untuk memastikan alokasi sumber daya keuangan berjalan sesuai dengan kebutuhan operasional dan tujuan usaha jangka pendek maupun jangka panjang.
- b. Pencatatan keuangan merupakan kegiatan pencatatan sistematis terhadap seluruh transaksi keuangan, baik berupa pemasukan maupun pengeluaran, guna mendukung akurasi data dan akuntabilitas keuangan.
- c. Pelaporan keuangan mencakup penyusunan laporan keuangan sederhana seperti laporan laba rugi, arus kas, dan neraca berdasarkan hasil pencatatan, yang berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja dan dasar pengambilan keputusan bisnis.
- d. Pengendalian keuangan mengacu pada proses pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana, termasuk upaya untuk mencegah pemborosan, kecurangan, serta penyimpangan dari perencanaan yang telah ditetapkan.

Keempat indikator tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu siklus manajemen keuangan yang komprehensif. Ketidakterlaksanaan salah satu aspek dapat mengganggu efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna mengkaji implementasi keempat aspek tersebut oleh pelaku UMKM di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam mendukung peningkatan literasi keuangan dan kapasitas manajerial UMKM, khususnya di sektor perdagangan tradisional.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini bertujuan untuk menguraikan konsep-konsep dasar yang mendasari variabel penelitian serta memberikan landasan ilmiah melalui hasil-hasil penelitian sebelumnya. Kajian ini tidak hanya memperjelas kerangka berpikir yang digunakan, tetapi juga menjadi pijakan dalam merumuskan masalah dan arah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amri dan Iramani (2018) mengkaji pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kota Surabaya. Dalam studinya, literasi keuangan dibagi ke dalam tiga indikator utama, yaitu: literasi pencatatan laporan keuangan, literasi pengelolaan utang, dan literasi penyusunan anggaran. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi logistik terhadap 73 responden pelaku UMKM, hasil penelitian

menunjukkan bahwa seluruh dimensi literasi keuangan tersebut berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha. Pelaku UMKM yang memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih baik terbukti mampu mengelola arus kas secara lebih efisien, meningkatkan omzet, dan membuat keputusan keuangan yang lebih tepat.

Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa penguasaan terhadap pencatatan transaksi, pengelolaan kewajiban, serta penyusunan anggaran merupakan elemen strategis dalam memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi salah satu rujukan penting dalam memperkuat landasan teoretis mengenai pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan dan kinerja UMKM.

Sementara itu, penelitian lain oleh Arianto, Rahmiyanti, dan Handayani (2024) memberikan kontribusi dalam konteks pemberdayaan komunitas UMKM melalui penguatan aspek keuangan dan pemasaran digital. Studi ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Tempong, Kota Serang, dengan fokus pada peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan sederhana baik secara manual maupun dengan menggunakan aplikasi keuangan digital seperti *BukuKas*. Pendampingan ini juga mencakup pelatihan dalam memisahkan keuangan pribadi dan bisnis, pencatatan transaksi harian, serta perencanaan keuangan jangka pendek.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelatihan tersebut memberikan dampak positif terhadap pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usaha secara mandiri. Meskipun laporan keuangan yang digunakan bersifat sederhana, pelaku usaha mampu mengevaluasi kondisi keuangan usahanya dan menyusun perencanaan yang lebih terstruktur. Penelitian ini mempertegas pentingnya literasi keuangan sebagai fondasi utama dalam tata kelola usaha mikro, terutama di tengah tantangan adaptasi digital dan manajemen bisnis yang kompleks.

Secara keseluruhan, kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi teoritis yang signifikan bagi penelitian ini. Temuan-temuan mereka menjadi landasan awal dalam menggali lebih dalam praktik pengelolaan keuangan UMKM, khususnya dalam konteks pasar tradisional seperti Pasar Beringharjo Yogyakarta, yang memiliki karakteristik pelaku usaha dan ekosistem bisnis tersendiri.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik pengelolaan keuangan yang dijalankan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pasar Beringharjo,

Yogyakarta. Fokus penelitian diarahkan pada empat indikator utama dalam manajemen keuangan, yakni: perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna, pengalaman, dan kebiasaan pelaku usaha secara kontekstual dan komprehensif (Moleong, 2017).

Lokasi penelitian ditetapkan di Pasar Beringharjo, salah satu pasar tradisional terbesar di Kota Yogyakarta, yang dikenal sebagai pusat aktivitas ekonomi rakyat. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga Februari 2025. Adapun informan penelitian berjumlah 33 orang pelaku UMKM, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria: (1) aktif menjalankan usaha minimal selama satu tahun, (2) melakukan pencatatan keuangan secara manual, dan (3) bersedia untuk diwawancara dan diamati praktik pengelolaan keuangannya. Pemilihan teknik ini bertujuan untuk memastikan keterwakilan informasi yang relevan dan mendalam (Sugiyono, 2020).

Teknik pengumpulan data meliputi: wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait praktik keuangan pelaku usaha, seperti penyusunan anggaran, pencatatan arus kas, dan pemanfaatan laporan keuangan sederhana. Observasi dilakukan untuk mencatat secara langsung kebiasaan pelaku usaha dalam memisahkan keuangan pribadi dan usaha, mencatat utang/piutang, serta menerapkan pengendalian kas. Dokumentasi berupa foto buku kas, nota transaksi, dan laporan laba rugi dikumpulkan sebagai bukti pelengkap.

Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, serta dilakukan konfirmasi data (*member checking*) kepada lima informan kunci guna memverifikasi hasil temuan. Penelitian ini juga menerapkan prinsip keabsahan data kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2017), yang meliputi aspek kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik, sebagaimana dijelaskan oleh Salim (2020), yang mencakup beberapa tahap: (1) memahami keseluruhan data (familiarisasi), (2) melakukan pengkodean awal, (3) mengelompokkan kode menjadi tema, dan (4) menyusun narasi hasil analisis berdasarkan empat kategori utama: perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan.

Selama proses penelitian, aspek etika penelitian dijaga dengan memastikan kerahasiaan identitas responden, memperoleh persetujuan secara sadar (*informed consent*), serta tidak melakukan intervensi terhadap kegiatan usaha yang sedang berlangsung. Seluruh transkrip dan dokumentasi disimpan secara sistematis sebagai bentuk jejak audit (*audit trail*) yang dapat ditinjau ulang oleh pembimbing atau pihak penelaah jurnal.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Umum Pelaku UMKM di Pasar Beringharjo

Bagian ini menyajikan karakteristik awal pelaku usaha yang menjadi partisipan dalam penelitian, dengan tujuan untuk memberikan konteks demografis yang dapat memengaruhi pola pengelolaan keuangan mereka. Penelitian ini melibatkan sebanyak **33** pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beroperasi di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Fokus utama penelitian diarahkan pada empat indikator pengelolaan keuangan, yaitu perencanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi lapangan.

Berdasarkan data demografis, mayoritas partisipan berada dalam kelompok usia produktif dan dewasa. Seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 1, kelompok usia terbanyak adalah 41–50 tahun (48,4%), diikuti oleh >51 tahun (27,3%), 31–40 tahun (15,2%), dan 21–30 tahun (9,1%).

Tabel 1 Distribusi Umur Partisipan

No	Umur (Tahun)	Jumlah	(%)
1	21-30	3	9.1%
2	31-40	5	15.2%
3	41-50	16	48.4%
4	>51	9	27.3%
Jumlah		33	100%

Sumber: Data Hasil Penelitian Lapangan (2025)

Distribusi umur ini mengindikasikan bahwa pelaku UMKM di Pasar Beringharjo sebagian besar berada pada usia paruh baya dan lanjut. Usia tersebut diyakini memengaruhi pola pengambilan keputusan keuangan, di mana pengalaman lebih dominan daripada pendekatan berbasis sistem atau teknologi. Kelompok usia ini juga umumnya mempertahankan kebiasaan lama seperti pencatatan manual dan pengelolaan kas secara konvensional. Minimnya partisipasi pelaku usaha usia muda dapat menjadi tantangan dalam proses digitalisasi pengelolaan keuangan di sektor ini.

Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian Wicaksono dan Wibowo (2021) yang menyatakan bahwa usia pelaku UMKM memiliki pengaruh signifikan terhadap pola pengelolaan keuangan, di mana semakin tua usia pelaku usaha, semakin besar kecenderungannya untuk mempertahankan metode konvensional dan enggan mengadopsi teknologi pencatatan.

Selain aspek usia, tingkat pendidikan terakhir juga turut memengaruhi kapasitas pelaku UMKM dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan. Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden berpendidikan menengah (SMA) dan hanya sebagian kecil yang menempuh pendidikan tinggi

Tabel 2 Tingkat Pendidikan Terakhir Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	(%)
1	Tamat SD	2	6.1%
2	Tamat SMP	7	21.2%
3	Tamat SMA	14	42.4%
4	Diploma	4	12.1%
5	Stara 1	6	18.2%
Jumlah		33	100%

Sumber: Data Hasil Penelitian Lapangan (2025)

Tingkat pendidikan yang dominan pada jenjang menengah menunjukkan adanya keterbatasan dalam akses maupun pemahaman terhadap konsep manajemen keuangan yang lebih kompleks. Hal ini menguatkan urgensi pelatihan dan pendampingan praktis yang sesuai dengan kapasitas literasi pelaku usaha, guna mendorong peningkatan tata kelola keuangan yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

Struktur usia partisipan menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Pasar Beringharjo didominasi oleh individu berusia 41 tahun ke atas, yang mengindikasikan tingkat keberlanjutan usaha yang cukup mapan dari sisi pengalaman. Namun, secara teoritis, usia yang lebih tinggi juga sering kali berkorelasi dengan resistensi terhadap perubahan, termasuk dalam hal inovasi pengelolaan keuangan. Kecenderungan untuk mengandalkan intuisi dan kebiasaan turun-temurun tanpa pendekatan berbasis data dapat menjadi kendala dalam menghadapi dinamika pasar yang semakin kompleks. Rendahnya keterwakilan partisipan usia muda dalam konteks ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri terhadap regenerasi pelaku usaha dan lambatnya adopsi praktik keuangan berbasis teknologi, yang seharusnya menjadi bagian dari upaya modernisasi pasar tradisional.

Sementara itu, distribusi tingkat pendidikan memperlihatkan bahwa mayoritas partisipan hanya menempuh pendidikan sampai jenjang menengah. Kondisi ini berpotensi membatasi akses terhadap pengetahuan teknis mengenai akuntansi usaha dan manajemen keuangan, yang dalam praktiknya penting untuk menyusun laporan laba rugi, mengelola arus kas, hingga membuat proyeksi usaha. Pendidikan formal yang terbatas juga dapat memengaruhi daya tangkap terhadap pelatihan-pelatihan yang bersifat teoritis. Oleh karena itu, strategi peningkatan kapasitas keuangan UMKM perlu memperhatikan aspek pedagogis yang kontekstual, dengan pendekatan berbasis praktik langsung dan menggunakan bahasa yang

sesuai dengan tingkat pemahaman pelaku usaha. Dalam hal ini, dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga pendamping sangat krusial dalam menjembatani kesenjangan antara kapasitas partisipan dengan tuntutan tata kelola keuangan yang ideal.

Analisis Data

Kebutuhan dan Kesadaran Pelaku UMKM terhadap Perencanaan Keuangan

Dalam kaitannya dengan kapasitas dasar pelaku UMKM dalam menjalankan usaha, hasil temuan awal penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh responden yang menjadi partisipan menyatakan memerlukan sistem pembukuan. Temuan ini mengindikasikan bahwa aspek pencatatan keuangan bukan hanya menjadi kewajiban administratif semata, tetapi telah dirasakan sebagai kebutuhan penting dan mendesak dalam mendukung kelangsungan dan pengembangan usaha. Sebanyak 100% partisipan menyatakan bahwa pembukuan merupakan elemen fundamental dalam pengelolaan usaha yang tertib, berkelanjutan, dan sejalan dengan prinsip-prinsip manajerial yang baik.

Tingginya kesadaran ini juga memperlihatkan bahwa pelaku UMKM telah memiliki pemahaman normatif mengenai pentingnya sistem pencatatan keuangan yang rapi dan sistematis, walaupun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala. Di lapangan, implementasi sistem pembukuan kerap kali dihadapkan pada hambatan teknis, seperti keterbatasan pengetahuan akuntansi, keterbatasan akses informasi, dan latar belakang pendidikan yang bervariasi. Namun demikian, urgensi untuk memiliki sistem keuangan yang tertata tetap dirasakan secara luas oleh para pelaku usaha. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa keterbatasan pendidikan formal dan minimnya pengalaman administratif tidak serta-merta menjadi penghalang bagi pelaku UMKM untuk memahami pentingnya pencatatan keuangan yang baik.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diya Faaizah Febriyani, Mukminati Ridwan, dan Wahyuni (2024), yang mengungkapkan rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap laba bersih dan pentingnya penyusunan laporan laba rugi berbasis SAK-EMKM. Dalam studi kasus yang mereka teliti, salah satu pemilik UMKM menyatakan secara eksplisit:

“Saya tidak ku tahu itu saja cuman putar-putar uang saja kalau saya beli barang ya saya cari keuntungan saya, karena semua ini keuntungan toko.”

Pernyataan tersebut mencerminkan minimnya pemahaman terhadap struktur laba rugi dan pentingnya pelaporan keuangan yang terstandar. Pemilik toko tersebut menganggap seluruh hasil penjualan sebagai keuntungan, tanpa membedakan antara pendapatan kotor dan

laba bersih. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya peningkatan literasi akuntansi di kalangan pelaku UMKM agar mereka mampu menyajikan informasi keuangan yang akurat dan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi usaha.

Penelitian Febriyani dkk. juga menegaskan bahwa tanpa pemahaman yang memadai, pelaku UMKM tidak dapat menganalisis kinerja keuangan mereka secara efektif, dan akibatnya tidak mampu membuat keputusan bisnis yang tepat. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan dalam menerapkan SAK-EMKM, khususnya dalam menyusun laporan laba rugi, akan sangat membantu pelaku usaha dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan, mengidentifikasi area perbaikan, serta meningkatkan kinerja usaha secara keseluruhan.

Dengan mempertimbangkan temuan-temuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya pembukuan sudah cukup tinggi, tetapi masih belum diiringi oleh kemampuan teknis yang memadai untuk menerapkannya secara konsisten. Kondisi tersebut membuka ruang bagi intervensi strategis dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun organisasi pendamping UMKM, untuk merancang program pelatihan teknis serta pendampingan akuntansi yang bersifat praktis, aplikatif, dan berkelanjutan.

Upaya peningkatan literasi keuangan ini diharapkan tidak hanya menghasilkan pelaku usaha yang lebih tertib dalam pencatatan, tetapi juga mampu **mengelola dan mengevaluasi kinerja usaha berdasarkan data keuangan yang valid**, serta menyusun strategi pengembangan yang berbasis pada informasi yang terukur. Dengan demikian, sistem pembukuan bukan hanya menjadi alat dokumentasi, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi perencanaan, pengambilan keputusan, dan pertumbuhan usaha yang sehat dan berdaya saing tinggi

Tabel 3 berikut memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa dari 33 pelaku UMKM yang menjadi responden, seluruhnya menyatakan membutuhkan sistem pembukuan.

Tabel 3 Kebutuhan Sistem Pembukuan

No	Membutuhkan Sistem Pembukuan	Jumlah	(%)
1	Membutuhkan Sistem Pembukuan	33	100%
2	Tidak Membutuhkan Sistem Pembukuan	0	0%
Jumlah		33	100%

Sumber: Data Hasil Penelitian Lapangan

Berdasarkan Tabel 3, seluruh pelaku UMKM (100%) menyatakan membutuhkan sistem pembukuan. Hal ini mengindikasikan adanya kesadaran kolektif akan pentingnya

pengelolaan keuangan yang terstruktur. Temuan ini menunjukkan potensi yang besar untuk peningkatan kapasitas manajerial melalui pelatihan akuntansi dasar.

Penerapan Pencatatan Keuangan dalam Praktik UMKM

Pencatatan keuangan merupakan salah satu pilar penting dalam pengelolaan usaha, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pencatatan yang tertib dan konsisten dapat menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan usaha, perencanaan keuangan, pengawasan arus kas, serta pengendalian terhadap piutang dan utang usaha (Harahap et al., 2025). Dalam praktiknya, pencatatan keuangan UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi pemahaman, kesadaran, maupun keterampilan teknis pelaku usaha. Data dari hasil penelitian lapangan berikut ini memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana UMKM menerapkan pencatatan keuangan dalam aktivitas operasional sehari-hari, khususnya dalam aspek pencatatan kas harian, piutang, dan utang.

Tabel 4 Pencatatan Kas Harian

No	Mencatat Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Jumlah	(%)
1	Mencatat penerimaan dan pengeluaran kas	33	100%
2	Tidak mencatat penerimaan dan Pengeluaran kas	0	0%
Jumlah		33	100%

Sumber: Data Hasil Penelitian Lapangan

Berdasarkan Tabel 4 di atas, dapat dilihat bahwa seluruh responden (100%) menyatakan telah melakukan pencatatan atas kas harian, baik untuk transaksi penerimaan maupun pengeluaran. Fakta ini menunjukkan bahwa aspek kas menjadi perhatian utama bagi pelaku UMKM, yang kemungkinan besar disebabkan oleh sifat transaksi kas yang bersifat langsung, rutin, dan berkaitan erat dengan kelangsungan aktivitas operasional harian. Keterlibatan penuh dalam pencatatan kas juga bisa menjadi indikator bahwa pelaku UMKM menyadari pentingnya arus kas dalam menjaga likuiditas usaha mereka. Namun demikian, pencatatan kas yang dilakukan belum tentu mencerminkan sistem akuntansi yang terstandar, karena bisa jadi pencatatan tersebut dilakukan secara sederhana atau manual.

Tabel 5 Pencatatan Piutang

No	Buku Pencatatan Piutang	Jumlah	(%)
1	Mencatat Piutang	18	54.5%
2	Tidak Mencatat Piutang	15	45.5%
Jumlah		33	100%

Sumber: Data Hasil Penelitian Lapangan

Jika dibandingkan dengan pencatatan kas, pencatatan piutang oleh UMKM menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih rendah. Sebanyak 54,5% pelaku UMKM

menyatakan melakukan pencatatan piutang pelanggan, sementara 45,5% lainnya tidak melakukan pencatatan secara formal. Hal ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari responden masih mengandalkan ingatan atau pencatatan informal dalam mengelola piutang. Ketidaktertiban dalam pencatatan piutang berisiko menyebabkan kehilangan pendapatan yang seharusnya bisa tertagih, serta mengaburkan informasi arus kas yang akan diterima. Minimnya pencatatan juga dapat menunjukkan bahwa pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami potensi kerugian finansial yang timbul dari piutang tak tertagih.

Tabel 6 Pencatatan Utang

No	Buku Pencatatan Utang	Jumlah	(%)
1	Mencatat Utang	10	30.3
2	Tidak Mencatat Utang	23	69.7
Jumlah		33	100%

Sumber: Data Hasil Penelitian Lapangan

Tabel 6 menunjukkan bahwa tingkat pencatatan utang di kalangan UMKM lebih rendah lagi dibandingkan pencatatan piutang. Hanya 30,3% pelaku usaha yang melakukan pencatatan utang secara formal, sementara mayoritas, yaitu 69,7%, tidak melakukan pencatatan sama sekali. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh tingginya proporsi transaksi tunai dalam praktik UMKM, yang menyebabkan pelaku usaha merasa tidak perlu mencatat kewajiban utang. Namun demikian, absennya pencatatan utang tetap merupakan permasalahan serius, karena dapat mengaburkan informasi terkait kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi. Tanpa pencatatan yang jelas, pelaku usaha berisiko menghadapi kesulitan likuiditas, gagal bayar, atau terhambatnya perencanaan keuangan di masa depan.

Pelaporan Keuangan sebagai Alat Evaluasi Usaha

Dalam konteks pengelolaan usaha yang efektif, pelaporan keuangan memegang peranan penting sebagai alat evaluasi kinerja dan dasar pengambilan keputusan strategis. Salah satu bentuk pelaporan keuangan yang krusial adalah laporan laba rugi. Laporan ini berfungsi untuk mengetahui hasil usaha dalam suatu periode tertentu, apakah menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian. Oleh karena itu, pelaku UMKM seharusnya menjadikan laporan laba rugi sebagai bagian dari rutinitas pencatatan keuangan yang tidak dapat diabaikan.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh responden UMKM (100%) telah melakukan pencatatan atau perhitungan laba rugi dalam menjalankan usaha mereka. Hal ini dapat diartikan sebagai bentuk kesadaran awal pelaku usaha akan pentingnya evaluasi performa usaha secara berkala. Data ini terangkum dalam Tabel 7 berikut.

Tabel 7 Perhitungan Laba Rugi

No	Respon	Jumlah	(%)
1	Mencatat Perhitungan Laba	33	100%
2	Tidak Mencatat Perhitungan Laba	0	0%
Jumlah		33	100%

Sumber: Data Hasil Penelitian Lapangan

Meskipun seluruh responden telah melakukan pencatatan laba rugi, namun frekuensi pelaksanaannya tidak seragam. Perbedaan frekuensi ini mencerminkan keberagaman kapasitas, prioritas, serta strategi pelaporan yang digunakan oleh masing-masing pelaku UMKM. Sebagaimana disajikan dalam Tabel 8, mayoritas responden (45,5%) melakukan pencatatan laba rugi secara bulanan. Sementara itu, sebagian lainnya melakukan pencatatan harian (24,4%), enam bulanan (12%), tahunan (12%), dan mingguan (6,1%).

Tabel 8 Frekuensi Perhitungan Laba Rugi

No	Periode Perhitungan Laba Rugi	Jumlah	(%)
1	Periode Satu Hari Sekali	8	24.4%
2	Periode Satu Minggu Sekali	2	6.1%
3	Periode Satu Bulan Sekali	15	45.5%
4	Periode Enam Bulan Sekali	4	12%
5	Periode Satu Tahun Sekali	4	12%
Jumlah		33	100%

Sumber: Data Hasil Penelitian Lapangan

Frekuensi pencatatan laba rugi yang bervariasi ini mengindikasikan adanya perbedaan dalam manajemen keuangan dan orientasi pengambilan keputusan antar pelaku UMKM. Pelaku usaha yang melakukan pencatatan secara bulanan atau harian cenderung lebih aktif dalam memantau performa usaha dan merespons perubahan pasar. Sebaliknya, pencatatan yang dilakukan dalam periode yang lebih panjang dapat menimbulkan keterlambatan dalam mendeteksi permasalahan usaha secara dini.

Pemanfaatan Informasi Keuangan untuk Pengambilan Keputusan

Pelaporan laba rugi tidak hanya sebatas dokumentasi keuangan, melainkan memiliki potensi besar sebagai instrumen evaluasi dan penentu arah kebijakan usaha (Daroeni, 2024). Namun demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa belum semua pelaku UMKM memanfaatkan laporan laba rugi secara optimal dalam pengambilan keputusan. Sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 9, hanya 54,5% responden yang menyatakan bahwa mereka menggunakan laporan laba rugi sebagai pedoman untuk mengukur keberhasilan usaha. Sementara 45,5% lainnya belum menjadikannya sebagai alat ukur yang aktif dalam strategi usaha mereka.

Tabel 9 Pemanfaatan Laporan Laba Rugi

No	Pencatatan Pendapatan	Jumlah	(%)
1	Tidak Sebagai Pedoman Mengukur Suatu Keberhasilan Usaha	15	45.5%
2	Sebagai Pedoman Untuk Mengukur Keberhasilan Usaha	18	54.5%
Jumlah		33	100%

Sumber: Data Hasil Penelitian Lapangan

Temuan ini menjadi indikasi bahwa masih terdapat kesenjangan antara praktik pencatatan dengan pemanfaatan informasi keuangan dalam proses pengambilan keputusan. Pelaku usaha yang belum menggunakan laporan laba rugi secara aktif kemungkinan besar masih memandang aktivitas pencatatan sebagai formalitas administratif, bukan sebagai alat analisis yang dapat digunakan untuk meningkatkan performa bisnis. Kurangnya pemanfaatan laporan ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam strategi operasional, penetapan harga, alokasi biaya, dan ekspansi usaha.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, pengelolaan keuangan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pasar Beringharjo menunjukkan bahwa praktik pencatatan keuangan yang dilakukan masih bersifat parsial dan belum komprehensif. Meskipun seluruh responden menyatakan telah melakukan pencatatan kas harian serta menyusun laporan laba rugi secara berkala, namun aspek pencatatan lainnya seperti piutang, utang, dan persediaan masih belum mendapat perhatian yang memadai.

Secara lebih rinci, pencatatan piutang dan utang hanya dilakukan oleh sebagian kecil responden. Bahkan, pencatatan persediaan sama sekali tidak ditemukan dalam praktik keuangan UMKM yang diteliti. Kondisi ini menunjukkan bahwa orientasi pencatatan masih terbatas pada transaksi kas yang bersifat langsung, sedangkan aspek lain yang sangat penting dalam mencerminkan posisi keuangan usaha belum diakomodasi dalam sistem pencatatan yang dilakukan. Hal ini menjadi salah satu indikator lemahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap sistem akuntansi keuangan yang utuh dan terstandar.

Permasalahan lain yang cukup mendasar adalah tidak adanya pemisahan antara dana pribadi dan dana usaha. Ketiadaan pemisahan ini berdampak langsung terhadap ketidakakuratan dalam menyusun anggaran, penentuan kebutuhan modal kerja, serta pengukuran tingkat profitabilitas usaha secara objektif. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menyulitkan pelaku usaha dalam merumuskan strategi pertumbuhan, mengevaluasi

keberhasilan usaha, dan menyusun laporan keuangan yang dibutuhkan dalam mengakses pembiayaan formal dari lembaga keuangan.

Aspek pengendalian keuangan juga menjadi titik lemah dalam praktik UMKM di Pasar Beringharjo. Tidak ditemukan adanya mekanisme formal berupa rekonsiliasi kas, SOP untuk koreksi kesalahan pencatatan, maupun audit internal sederhana. Pengendalian keuangan yang berjalan saat ini lebih bersifat intuitif dan tidak berbasis pada sistem dan prosedur yang terdokumentasi. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan usaha masih sangat bergantung pada pengalaman pribadi atau naluri, bukan pada prinsip-prinsip akuntansi yang objektif dan transparan.

Temuan ini selaras dengan hasil penelitian oleh Rahman dan Ayudhi (2020) dalam Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing, yang menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM. Dalam penelitiannya terhadap 171 UMKM di Kecamatan Padang Barat, diketahui bahwa penerapan SAK EMKM mampu mendorong pertumbuhan skala usaha, peningkatan jumlah karyawan, serta penambahan nilai aset usaha. Secara statistik, pengaruh SAK EMKM terhadap pertumbuhan UMKM tercermin dari nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan koefisien determinasi sebesar 55,90%, yang menunjukkan bahwa lebih dari setengah variasi pertumbuhan UMKM dapat dijelaskan oleh penerapan SAK EMKM.

Dengan demikian, jika pengelolaan keuangan UMKM di Pasar Beringharjo ingin ditingkatkan, maka salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah dengan mendorong adopsi SAK EMKM secara bertahap. Standar ini dirancang secara khusus oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menjawab kebutuhan pelaporan keuangan UMKM yang sederhana, efisien, dan aplikatif. Penerapan SAK EMKM mencakup tiga komponen utama laporan keuangan, yaitu: laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Ketiganya dapat menjadi instrumen penting dalam membantu pelaku UMKM menyajikan informasi keuangan yang akurat, relevan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan antar periode.

Oleh karena itu, untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan UMKM di lingkungan seperti Pasar Beringharjo, diperlukan intervensi dalam bentuk pelatihan praktis dan pendampingan akuntansi dasar. Pelatihan tersebut tidak hanya difokuskan pada aspek teknis pencatatan, tetapi juga pada pemahaman prinsip dasar akuntansi, pemisahan entitas usaha-pribadi, serta penggunaan laporan keuangan sebagai alat evaluasi dan pengambilan keputusan. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendamping UMKM, dan institusi

pendidikan tinggi juga perlu diperkuat agar tercipta ekosistem pembinaan yang berkelanjutan dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan UMKM.

Dengan peningkatan literasi keuangan dan penerapan standar pelaporan yang memadai, UMKM tidak hanya mampu bertahan di tengah persaingan pasar, tetapi juga memiliki daya saing untuk tumbuh secara berkelanjutan, terintegrasi dalam sistem ekonomi formal, serta berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV mengenai pengelolaan keuangan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pasar Beringharjo Yogyakarta, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

a. Perencanaan Keuangan

Seluruh pelaku UMKM menyadari pentingnya sistem pembukuan, terbukti dari 100% responden yang menyatakan membutuhkan pembukuan. Namun, praktik perencanaan keuangan masih belum berjalan efektif karena sebagian besar pelaku usaha belum memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Akibatnya, proses perencanaan anggaran dan pengelolaan modal kerja menjadi kurang akurat dan tidak terdokumentasi secara sistematis.

b. Pencatatan Keuangan

Seluruh responden (100%) melakukan pencatatan kas harian, menunjukkan bahwa pencatatan dasar sudah menjadi kebiasaan umum. Akan tetapi, pencatatan piutang hanya dilakukan oleh 54,5% pelaku UMKM, dan pencatatan utang hanya dilakukan oleh 30,3%. Tidak ada satupun pelaku usaha yang mencatat persediaan secara rutin. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan keuangan belum mencakup seluruh aspek penting yang dibutuhkan dalam pengelolaan usaha.

c. Pelaporan Keuangan

Semua responden menghitung laba-rugi, namun hanya 45,5% yang melakukannya secara bulanan. Sisanya mencatat secara harian, mingguan, enam bulanan, atau bahkan tahunan. Selain itu, hanya 54,5% pelaku usaha yang menggunakan laporan laba rugi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Hal ini menandakan bahwa pelaporan belum berfungsi secara optimal sebagai alat evaluasi manajerial.

d. Pengendalian Keuangan

Pengendalian keuangan merupakan aspek yang paling lemah. Pelaku UMKM belum memiliki prosedur pengawasan kas, tidak melakukan rekonsiliasi, serta tidak menyusun laporan persediaan atau audit keuangan sederhana. Kontrol internal masih bersifat intuitif dan belum didasarkan pada prosedur standar atau prinsip pengendalian keuangan seperti yang dianjurkan dalam kerangka COSO.

Secara umum, pengelolaan keuangan pelaku UMKM di Pasar Beringharjo belum dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Praktik pengelolaan yang dilakukan masih bersifat parsial, hanya mencakup aspek dasar seperti kas dan laba, tetapi belum menyentuh aspek penting lainnya seperti utang, piutang, persediaan, dan pengendalian internal. Hal ini berdampak pada rendahnya akurasi informasi keuangan dan kurangnya dasar dalam pengambilan keputusan usaha.

DAFTAR REFERENSI

- Amri, A. F., & Iramani. (2018). Pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM di Surabaya (Skripsi, STIE Perbanas Surabaya).
- Arianto, B., Rahmiyanti, S., & Handayani, B. (2024). Pemberdayaan komunitas UMKM berbasis penguatan aspek keuangan dan pemasaran digital di Kota Serang. *Ruang Komunitas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 15–23. <https://doi.org/10.24252/rkjpm.v2i1.46247>
- Daroeni, M. (2024). Analisis sistem pencatatan akuntansi pada usaha mikro kecil dan menengah di Kawunganten (Studi kasus UMKM Keripik Pisang Bapak Hakim) (Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto).
- Febriyani, D. F., Ridwan, M., & Wahyuni. (2024). Penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK-EMKM pada UMKM Toko Windy Reski. *Accounting Profession Journal (APAJI)*, 6(2), 52–77. <https://doi.org/10.35593/apaji.v2i6.215>
- Harahap, T., Aziz, A., Febrina, D., Sanjaya, M., & Chandra, K. (2025). Persepsi pelaku usaha kecil dan menengah terhadap manfaat pencatatan keuangan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi di Medan Utara. *Jurnal Ekuivalensi*, 11(1), 95–111.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Mukoffi, A., Sulistiyowati, Y., Reda, R. I., & As'adi, A. (2023). Pengaruh audit laporan keuangan, penerapan good governance, dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan. *Liabilities: Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 6(2), 12–20.
- Nabilah, M. (2023, Oktober 13). Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia berdasarkan kelasnya (2021). Databoks.

<https://databoks.katadata.co.id/keuangan/statistik/cdcfe12b8f8af2b/usaha-mikro-tetap-merajai-umkm-berapa-jumlahnya>

Nugraha, G. I. K., Handayati, P., & Siswanto, E. (2025). The effect of financial literacy and access to financing on the financial performance of MSMEs: The role of financial management mediation and financial technology moderation (A systematic literature review). *Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR)*, 4(6), 2541–2560. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i6.261>

Salim, A. (2020). Metodologi penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk penelitian sosial, pendidikan, dan humaniora. Kencana.

Sugiyono. (2020). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Suryani, T., & Hendrawan, R. (2021). Financial literacy and business sustainability of SMEs in Indonesia. *Journal of Entrepreneurship Education*, 24(5), 1–10.

Wahyudi, R., & Hidayati, N. (2022). Implementasi SAK EMKM pada UMKM untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 321–332. <https://doi.org/10.18202/jamal.2022.08.13207>

Yuliana, S., & Prasetyo, A. (2020). Pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan UMKM di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(1), 45–56. <https://doi.org/10.24914/jeb.v23i1.2955>

Zainuddin, Z., & Lestari, I. (2023). Digital financial management training for SMEs: Improving competitiveness in the post-pandemic era. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 210–219. <https://doi.org/10.31932/jpkm.v5i2.489>